



OPTIMALISASI PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM INTERVENSI PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BATANG

Hendy Setiawan¹, Rosy Febriani Daud²

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Selamat Sri

¹hendysetiawan2020@mail.ugm.ac.id *, ²rosydaud@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mendiskusikan optimalisasi peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam intervensi penanganan stunting di Kabupaten Batang. Meskipun berbagai program CSR telah diterapkan oleh sektor swasta, hingga kini belum ada kajian yang secara khusus menganalisis sejauh mana kontribusinya telah dimanfaatkan secara optimal dalam penurunan stunting di daerah tersebut. Research gap ini penting karena keterlibatan CSR berpotensi besar mendukung pemerintah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran penanganan stunting. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari sumber sekunder dan dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi CSR sektor swasta telah memberikan dampak positif bagi pengurangan stunting, namun pemanfaatannya belum optimal dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. Optimalisasi diperlukan agar intervensi CSR mampu memberikan tekanan hasil yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan perlunya pemerintah daerah memiliki pemetaan yang jelas, strategi kolaborasi yang lebih intens, serta jejaring kemitraan yang kuat dengan seluruh sektor swasta. Penguatan tata kelola CSR secara terpadu diharapkan dapat mempercepat upaya penuntasan stunting di Kabupaten Batang.

Kata Kunci : CSR, Kabupaten batang, Penanganan stunting, Sektor privat

ABSTRACT

This study discusses the optimization of Corporate Social Responsibility (CSR) in supporting stunting reduction efforts in Batang Regency. Although various CSR programs have been implemented by private-sector actors, there is still no comprehensive analysis examining whether these contributions have been utilized optimally in local stunting interventions. This research gap is critical, given that CSR has the potential to strengthen government programs that remain constrained by limited public funding. This research employs a qualitative method with a literature study approach. Data were collected from secondary sources and analyzed using the Miles and Huberman qualitative data analysis model. The findings indicate that CSR involvement has contributed positively to stunting reduction; however, its utilization has not yet been optimal or fully coordinated. Greater optimization is needed to produce more significant and sustainable outcomes. The study highlights the need for the local government to establish clear planning, detailed mapping, and stronger collaborative strategies with all private-sector entities. Strengthening integrated CSR governance is expected to accelerate stunting reduction efforts and support long-term sustainability in Batang Regency.

Keywords: CSR, Batang regency, Stunting intervention, Private Sector



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Tujuan tulisan ini akan mendiskusikan mengenai optimalisasi peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam mengintervensi penanganan stunting di Kabupaten Batang. Sudah diketahui bersama bahwa isu pembangunan kesehatan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Tanpa itu, upaya negara dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai [1]. Terlebih untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, maka negara harus konsisten untuk melakukan pembnaahan terhadap isu kesehatan, salah satu diantaranya ialah penanganan kasus kejadian stunting.

Fenomena kasus kejadian stunting, khususnya di kawasan-kawasan industrialisasi cenderung memiliki tingkat prevalensi yang cukup tinggi [2]. Hal ini didasarkan pada fakta empiris bahwa kawasan industrialisasi disebut-sebut menjadi faktor risiko tinggi kejadian stunting [3]. Laju dan pesatnya industrialisasi yang tidak terkendali seringkali berdampak pada sektor lingkungan, sosial, ekonomi, bahkan kesehatan. Bagi kesehatan, tentu laju industrialisasi dinilai mampu menjadi kontributor kasus kejadian stunting yang kronis.

Misalnya saja di Provinsi Sulawesi tengah prevalensi kasus kejadian stunting mencapai 27,2% [4]. Lalu di Kabupaten bojonegoro di mana kasus kejadian stunting yang cukup tinggi di 10 desa sekitar kawasan industri minyak dan gas. Rata-rata desa tersebut berada dalam ring 1 kawasan misnyak gas Lapangan Banyu Urip Blok Cepu. Prevalensinya berada dalam interval 22,5-29,9% [5]. Kasus serupa juga terjadi di kawasan-kawasan industrialisasi lainnya sehingga kecenderungan prevalensi tingginya stunting harus diwaspadai. Oleh karena itu, hubungan kawasan industrialisasi dengan

kasus kejadian stunting menjadi korelasi yang harus ditangani oleh pemerintah setempat agar kasus kejadian tersebut dapat diminimalisir.

Kasus kejadian stunting di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah juga masih menjadi tantangan berat yang belum tuntas diselesaikan. Apalagi kabupaten tersebut saat ini masih berbenah dalam pengembangan kawasan industrialisasi, yakni Kawasan Industrialisasi Terpadu Batang (KITB) [6]. Merujuk data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang mengkonfirmasi bahwa tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Batang tembus 21% [7]. Posisi ini menempatkan Kabupaten Batang masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kasus tinggi stunting di Provinsi Jawa Tengah.

Tingginya prevalensi angka tersebut harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang mengingat wilayah tersebut sedang tersu berbenah menuju kawasan industrialisasi yang lebih besar. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini ialah bagaimana memastikan pembangunan industrialisasi menjadi ladang sekaligus potensi untuk mengurangi laju stunting. Antisipasi ini penting untuk diproyeksikan ke depan, sehingga optimalisasi peran CSR menjadi langkah alternatif yang mampu dilakukan mengingat keterbatasan belanja publik yang dimiliki oleh pemerintah.

Studi tentang isu stunting di kabupaten Batang sebelumnya pernah dilakukan oleh Setiawan dan Choirunnisa, yakni terkait intervensi pangan lokal dalam penanganan stunting. Studi ini menunjukkan bahwa tingginya kasus kejadian stunting di Kabupaten Batang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ialah belum optimalnya konsumsi pangan lokal sebagai pangan alternatif bergizi dalam mengurangi angka stunting. Padahal ketersediaan pangan lokal

dan bergizi sangat cukup, namun literasi akan konsumsi pangan lokal bergizi di sana masih belum banyak diketahui [8].

Studi lainnya dilakukan oleh Jannah dkk terkait dengan pencegahan stunting pada anak dalam sudut pandang Islam di Kabupaten Batang. Hasil temuan menunjukkan bahwa penurunan signifikan stunting di kabupaten Batang dari 26,3 menjadi 10,1% di tahun 2023. Kolaborasi sektor privat, publik, dan masyarakat dengan penerapan nilai-nilai islam dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mencegah stunting [9]. Namun demikian, tulisan ini belum menyinggng mengenai peran CSR mengingat kawasan tersebut sedang berkembang laju industrialisasi.

Berdasarkan penelusuran peneliti, studi-studi yang mengulas mengenai stunting di kabupaten Batang masih cukup terbatas. Belum banyak peneliti sebelumnya yang memberikan perhatian tentang isu tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan melengkapi studi tentang isu stunting di Kabupaten Batang yakni terkaai dengan optimalisasi peran CSR dalam mengintervensi stunting. Rumusan utama masalah penelitian dalam tulisan ini ialah bagaimana optimalisasi peran CSR dalam intervensi stunting di Kabupaten Batang.

Ada dua alasan mengapa tulisan ini penting untuk dilakukan. Alasan pertama, keterlibatan sektor privat melalui CSR sangat vital dalam mendorong pengurangan stunting. Terlebih anggaran belanja publik masih sangat terbatas, sehingga pemerintah setempat perlu melakukan kerja kolaborasi dan kemitraan dalam penanganan stunting [10]. Alasan kedua ialah saat ini Kabupaten Batang sedang menuju ke arah pembangunan industrialisasi. Isu stunting dan industrialisasi memiliki hubungan yang cukup negatif, sehingga berobjek dengan kasus Kabupaten Batang maka tulisan ini akan memberikan gambaran

utuh bagaimana tumbuh kembang industrialisasi akan dinilai optimal dan positif apabilaa mampu menurunkan angka kasus kejadian stunting.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dikembangkan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka dalam penelitian kualitatif mengandalkan dan bertumpu pada data-data sekunder penelitian. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data peneliti bersandara pada sumber sumber data sekunder. Sumber itu meliputi informsi dan data yang ada di buku, jurna, berita, media masa, koran, majalah, arsip, laporan resmi pemerintah, catatan lapangan, ataupun sumber kajian lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian [11] [12] [13]. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1 Agustus hingga 15 September 2025. Penelitain ini memiliki lokus penelitian terkait dengan optimalisasi peran CSR dalam intervensi penurunan stunting di Kabupaten Batang.

Selain itu, penelitian ini di dalam teknik analisis data menggunakan model Milles dan Hubberman. Tahapan teknik analisis data kualitatif harus melewati pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan [14]. Setelah data dikumpulkan, maka perlu dilakukan pemilihan dan pemilihan data sesuai dengan relevansi rumusan dan tujuan penelitian. Data-data yang telah terpilih untuk digunakan, kemudian diolah dalam sebuah sajian baik berupa tampilan deskriptif maupun data visual. Data-data analisis yang sudah ditampilkan tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk melihat temuan-temuan data yang selaras dengan rumusan, tujuan, dan hasil penelitian lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian subhasil dan pembahasan ini, penulis akan menguraikan tiga hal utama. Subbab pertama bagian ini akan menguraikan mengenai ada tidaknya regulasi yang mengamatkan pelibatan sektor swasta ataupun industri dalam mengintervensi stunting. Regulasi ini penting karena menjadi dasar hukum kebijakan yang mengikat setiap sektor industri setempat untuk aktif terlibat dalam penanganan stunting.

Subbab kedua yakni akan menguraikan mengenai optimalisasi peran CSR yang telah berjalan. Adanya operasionalitas sektor industri setempat akan selalu melekat tanggungjawab sosial mereka, yakni adanya CSR. Merujuk UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan juga PP Nomor 47 Tahun 2012, CSR adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, bagian kedua ini akan menguraikan bagaimana peran CSR yang telah berjalan dalam penanganan stunting terkhusus di wilayah-wilayah sekitar tempat PT itu beroperasi di Kabupaten Batang.

Subbab ketiga yakni akan menguraikan keberlanjutan program CSR yang terus berjalan dan memastikan mampu menihilkan angka stunting. Proses keberlanjutan CSR ini penting dilakukan karena berbagai praktik yang ada, program CSR tidak memiliki nilai kesinambungan bahkan pengurangan angka stunting yang belum optimal justru program CSR dihentikan ditengah jalan. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan bagaimana keberlanjutan CSR yang dilakukan oleh sektor swasta di Kabupaten Batang.

Regulasi Pelibatan Sektor Industri dalam Intervensi Stunting

Keterlibatan sektor industri dalam intervensi stunting menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat penurunan angka stunting, karena peran swasta melalui program CSR dapat mendukung kebijakan

pemerintah yang bersifat multisektoral. Hal ini terlihat dari beberapa regulasi dan kebijakan yang sudah ada. Pertama, Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi landasan nasional utama yang menegaskan stunting sebagai prioritas nasional dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk ajakan kepada dunia usaha untuk ikut serta dalam intervensi melalui CSR.

Kedua, di tingkat daerah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting memberikan dasar hukum bagi kabupaten/kota, termasuk Batang, untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan program penanganan stunting. Regulasi itu merupakan turunan dari regulasi pusat dan kemudian menjadi dasar hukum bagi setiap Pemerintahan Daerah untuk aktif dan responsif dalam menanggulangi stunting.

Ketiga, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga mendorong perusahaan swasta di 12 provinsi prioritas agar menyisihkan dana CSR khusus untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Keempat, di Kabupaten Batang sendiri sudah ada praktik nyata, seperti Program GENTING (*Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting*) serta dukungan CSR dari Bank Jateng yang diarahkan langsung untuk membantu penanganan stunting. Adanya regulasi dan implementasi nyata tersebut, keterlibatan sektor industri diharapkan semakin kuat dalam mendukung program penurunan stunting secara berkelanjutan.

Keterlibatan sektor industri dalam intervensi stunting, keberadaan regulasi menjadi sangat penting sebagai dasar hukum, arah kebijakan, dan pedoman pelaksanaan program. Namun, jika regulasi seperti Perpres No. 72 Tahun 2021 maupun Peraturan

Gubernur Jawa Tengah No. 34 Tahun 2019 tidak dijalankan, maka akan muncul berbagai dampak yang merugikan pemerintah maupun hubungan dengan pihak swasta, khususnya dalam pelaksanaan CSR.

Pertama, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas pemerintah, sementara pihak swasta merasa ragu karena tidak ada kepastian regulasi yang mendukung keterlibatan mereka. *Kedua*, kinerja Pemerintah Daerah akan terhambat karena banyak program stunting di daerah sangat bergantung pada dukungan CSR dari swasta. *Ketiga*, ketidakjelasan tanggung jawab dapat terjadi karena regulasi seharusnya mengatur peran masing-masing pihak, sehingga tanpa implementasi, swasta berpotensi melepaskan diri dari kontribusi.

Keempat, program CSR bisa berjalan tidak terarah, tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, bahkan hanya sebatas pencitraan tanpa dampak nyata. *Kelima*, hubungan pemerintah dan swasta berisiko mengalami konflik karena adanya perbedaan persepsi terkait kewajiban dan fasilitasi yang seharusnya diatur regulasi. *Terakhir*, kegagalan menjalankan regulasi akan berdampak pada pencapaian target nasional penurunan stunting yang menjadi bagian dari RPJMN, sehingga bukan hanya mengganggu kredibilitas pemerintah di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga membahayakan kualitas generasi mendatang

Pelibatan sektor industri pada intervensi stunting di Kabupaten Batang, keberadaan regulasi yang jelas menjadi kunci untuk memperkuat peran CSR dan membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah dan swasta. Di Batang, sudah ada contoh nyata keterlibatan CSR seperti yang dilakukan oleh Bank Jateng, namun jika regulasi ditegakkan lebih sistematis, Pemerintah Daerah dapat memperkuatnya melalui regulasi lokal, misalnya Peraturan Bupati, yang mendorong atau mewajibkan perusahaan mengalokasikan

CSR khusus untuk program penurunan stunting. Selain itu, aspek pengawasan dan transparansi harus diperkuat dengan regulasi yang mengatur mekanisme monitoring, evaluasi, serta pelaporan publik agar program CSR yang dijalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Tidak kalah penting, pemerintah juga perlu menyediakan insentif atau penghargaan bagi perusahaan yang aktif berkontribusi dalam CSR stunting sehingga tercipta kemitraan yang saling menguntungkan, terarah, dan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka stunting di Batang.

Optimalisasi Peran CSR yang Sudah Berjalan

Optimalisasi peran CSR yang sudah berjalan di Batang menunjukkan beberapa bentuk keterlibatan swasta yang signifikan dalam upaya penanganan stunting. Misalnya, Bank Jateng Cabang Batang telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp 1 miliar kepada Pemkab Batang untuk mendukung intervensi stunting melalui program pembangunan jamban dan pemberian makanan tambahan di wilayah Kecamatan Limpung, Banyuputih, dan Gringsing.

Selain itu, dalam program *GENTING* (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), perusahaan seperti Nestle, Cimory, dan PT Indomarco turut serta menyumbangkan donasi, dan Bank Jateng memfasilitasi penyaluran dana secara nontunai langsung kepada orang tua asuh agar bantuan dapat transparan dan tepat sasaran. Dukungan dari Konsorsium Bhimasena Power Indonesia juga tercatat, yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga dan desa yang memiliki kasus stunting sebagai bagian dari program konvergensi penanganan stunting di Batang.

Adanya peran-peran nyata dari pihak swasta tersebut, terlihat bahwa CSR di Batang sudah mulai menjadi instrumen kemitraan antara pemerintah dan perusahaan yang fokus

pada aspek gizi, bahan pangan bergizi, dan fasilitas dasar guna menurunkan angka stunting secara sistematis. Gambar 1 merupakan keterlibatan swasta dalam intervensi stunting di Kabupaten Batang.



Gambar 1. *Penyerahan Funding CSR Guna Intervensi Stunting oleh Bank Jateng*

Program penanggulangan stunting dengan optimalisasi CSR seperti keterlibatan CSR dalam penanganan stunting di Kabupaten Batang seperti Bank Jateng telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp 1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Batang untuk program pembuatan jamban dan pemberian makanan tambahan di kecamatan Limpung, Banyuputih, dan Gringsing [15]. Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) di Batang mendapat dukungan CSR dari berbagai perusahaan seperti Bank Jateng, PDAM, Nestlé, Cimory, dan PT Indomarco, dengan total dana terkumpul mencapai Rp 487 juta untuk asupan gizi balita dan ibu hamil selama enam bulan [16]. Melalui skema CSR, PKK Batang menyalurkan bantuan sebesar Rp 500 juta kepada 281 anak terindikasi stunting dalam bentuk makanan bergizi selama kurun waktu enam bulan [17].

Keberlanjutan CSR dalam Mewujudkan Zero Stunting

Salah satu tantangan vital yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam intervensi CSR untuk penanganan stunting ialah aspek keberlanjutan. Aspek ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa isu

penanganan stunting harus tuntas sehingga masyarakat sasaran mampu memperoleh derajat kesehatan yang paripurna [18]. Oleh karena itu penuntasan isu penanganan stunting sangat bergantung bagaimana CSR yang diberikan oleh sektor industri bersifat berkelanjutan. Batas keberlanjutan ini akan dianggap tuntas dan final apabila angka prevalensi stunting mampu ditekan bahkan dinihilkan. Itupun pemerintah setempat masih melakukan pengawasan sehingga jika terjadi gejala stunting kembali mampu ditangani secara dini.

Aspek keberlanjutan ini yang sebelumnya belum menjadi kebijakan utama yang dimiliki Kabupaten Batang khususnya dalam memobilisasi CSR dalam penanganan stunting. Terlebih potensi sektor industri di Kabupaten cukup banyak, yakni di tahun 2023 saja ada sekitar 91 perusahaan industri besar dan sedang. Sektor privat itu mayoritas bergerak di industri makanan, industri kayu, dan tekstil. Mayoritas keberadaan mereka terkonsentrasi di Kecamatan Batang yakni 37 industri atau sekitar 40,66%. Lalu di Kecamatan Banyuputih terdapat sekitar 16,48% dan Kecamatan Gringsing sebesar 13,19% perusahaan. Sisa lainnya tersebar merata di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Batang.

Realitas itu merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Batang sehingga peluang CSR dalam penanganan stunting cukup potensial. Hanya saja sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Batang belum memiliki mapping akan implementasi CSR yang dilakukan oleh setiap industri tersebut dengan menekankan pendampingan program yang berkelanjutan. Belum lagi pemerintah setempat belum memiliki akurasi data yang akurat terhadap sektor industri mana saja yang aktif dalam program CSR di bidang stunting, lalu berapa besaran kucuran pendanaannya. Besar kecilnya pendanaan CSR itu juga sangat bergantung pada kapasitas industri baik yang

besar, sedang maupun kecil. Oleh karena itu di dalam membangun optimalisasi penggunaan CSR maka menjadi penting untuk dilakukan pemetaan sehingga aspek keberlanjutan itu dapat diproyeksikan. Gambar 2 merupakan pemberian apresiasi kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang dinilai aktif dalam program CSR khususnya memberikan perhatian dalam aspek kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Batang.



Gambar 2. BPI Mendapat Apresiasi dari Pemkab Batang Atas Dukungan Program CSR Bidang Kesehatan bagi Warga Batang

Visualisasi di atas merupakan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Batang kepada PT BPI yang telah dinilai aktif dalam penyaluran CSR di bidang kesehatan. Aspek kesehatan tidak hanya meliputi stunting, namun saling terkait seperti Open Defecation Free (ODF) dari kases sanitasi yang sudah mencapai 100%. Lalu juga sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) yang juga sudah mencapai 100%. Semua itu sangat berkaitan dengan kasus kejadian stunting dan sudah dilakukan oleh BPI.

Namun demikian, gerakan CSR yang serupa di Kabupaten Batang perlu digalakkan sebagai bagian dari penguatan konvergensi [19]. Apalagi perkembangan dewasa ini, sektor privat dituntut untuk seimbang dalam mengintegrasikan CSR dalam bisnis perusahaan, yakni keuntungan, lingkungan dan masyarakat [20]. Istilah ini dikenal dengan triple bottom line. Adanya triple bottom line ini diharapkan menjadi bentuk

hubungan mutualisme di mana ada keuntungan yang didapatkan sektor industri dan di saat yang sama masalah stunting mampu diatasi. Hal itu merupakan potensi sehingga bagi sektor industri yang belum aktif tentu saja pemerintah setempat memiliki kewenangan untuk menindak mengingat program CSR ialah amanat Undang-Undang [21].

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan CSR dari sektor swasta sangat berkontribusi signifikan dalam pengurangan stunting di Kabupaten Batang. Peran CSR sangat penting mengingat ada keterbatasan anggaran publik dalam penanganan stunting. Hanya saja pelibatan sektor swasta melalui CSR di Kabupaten Batang belum dilakukan secara optimal. Sementara jumlah sektor swasta melalui penggunaan CSR sangat penting, sehingga ke depan pemerintah setempat perlu memiliki rencana dan pemetaan yang jelas terhadap keterlibatan mereka dalam menanggulangi stunting.

Di samping itu, pemerintah setempat harus mampu membangun kolaborasi dalam penggunaan CSR secara intens di setiap sektor swasta yang ada. Walaupun pemerintah sudah melibatkan mereka, namun ke depan pemerintah harus lebih gencar untuk menjaring jejaring strategis dalam intervensi stunting. Terlebih penggunaan CSR dalam intervensi stunting harus mampu dijalankan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

5. Daftar Pustaka

- [1] H. Setiawan and C. Choirunnisa, "Tata Kelola Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang Holistik dan Inklusif Melalui ' Healthy Regency ' Berkelanjutan Holistic and Inclusive Community Health Development,"

- Salus Cult. J. Pembang. Mns. dan Kebud.*, vol. 4, no. 2, pp. 233–247, 2024, doi: <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.259>.
- [2] L. Oktavia, “Stunting pada Remaja Kawasan Buruh Industri dan Nelayan di Kota Surabaya,” *Biokultur*, vol. 9, no. 1, p. 1, 2020, doi: [10.20473/bk.v9i1.21723](https://doi.org/10.20473/bk.v9i1.21723).
- [3] Y. Pratiwi, S. S. Firdaus, and F. S. Sadewo, “Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Stunting Pada Kawasan Kumuh di Kabupaten Sidoarjo,” *J. Pelayanan dan Pengabd. Masy.*, vol. 8, no. 1, pp. 65–74, 2024, doi: [10.52643/pamas.v8i1.2703](https://doi.org/10.52643/pamas.v8i1.2703).
- [4] Resfaliza, N. Kamarni, and Purwasutrisno, “Kausalitas Antara Variabel Makro dan Stunting di Sumatera Barat Periode 2021 -2023,” *J. Inform. Ekon. Bisnis*, vol. 6, no. 3, pp. 658–668, 2024, doi: [10.37034/infek.v6i3.964](https://doi.org/10.37034/infek.v6i3.964).
- [5] A. Oktaviyanti, A. Taufiq, and H. Suhindarno, “Collaborative Governance in Efforts to Reduce Stunting in Bojonegoro Regency,” *J. Noken Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 2, pp. 481–493, 2024, doi: [10.33506/jn.v10i2.3822](https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3822).
- [6] Sutinnarto, “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Penanganan Konflik di Kawasan Industri Terpadu Batang,” *J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 1, pp. 1–8, 2022.
- [7] Jumadi, “Pj Bupati Batang Optimis Dapat Turunkan Angka Stunting,” *Batangkab.go.id*, 2022. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9395>
- [8] H. Setiawan and C. Choirunnisa, “Intervensi Diversifikasi Pangan Lokal dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Batang: Analisis Kajian Politik Keamanan Non-tradisional,” *Salus Cult. J. Pembang. Mns. dan Kebud.*, vol. 3, no. 2, pp. 78–90, 2023, doi: [10.55480/saluscultura.v3i2.112](https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.112).
- [9] Zahrotul Jannah, Zahrotul Wirda, Desy Adella, Nur Istiqomah, Muthmainnatun Mufidah, and Muhtar Ali Ahmadi, “Pencegahan Stunting Pada Anak Dalam Perspektif Islam Di Kabupaten Batang,” *PENDIMAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 64–71, 2025, doi: [10.47435/pendimas.v4i1.3307](https://doi.org/10.47435/pendimas.v4i1.3307).
- [10] S. Hanny Rizky Wasiat and R. Valiant Salomo, “Collaborative Governance in Accelerating Stunting Reduction through Corporate Social Responsibility,” *Santhet (Jurnal Sej. Pendidik. Dan Humaniora)*, vol. 8, no. 1, pp. 1122–1130, 2024, doi: [10.36526/santhet.v8i1.3948](https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3948).
- [11] H. Setiawan, “Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender Menuju Inklusivitas Sosial di Kabupaten Batang,” *Salus Cult. J. Pembang. Mns. dan Kebud.*, vol. 4, no. 1, pp. 79–90, 2024, doi: <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.134>.
- [12] A. J. Sutan and H. Setiawan, “Collaborative Governance Pentahelix : Inovasi Membangun Kota Pendidikan Inklusif Menuju Tatanan Sumber Daya Unggul Inclusive Education City Towards a Superior Resource System,” *Salus Cult. J. Pembang. Mns. dan Kebud.*, vol. 4, no. 2, pp. 202–216, 2024, doi: <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.311>.
- [13] Y. Erison and H. Setiawan, “Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta,” *Salus Cult. J. Pembang. Mns. dan Kebud.*, vol. 3, no. 2, pp. 135–146, 2023, doi: [10.55480/saluscultura.v3i2.119](https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.119).
- [14] B. M. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis a Method Sourcebook*, Edition 3., vol. 7, no. 1. California: SAGE Publications, 1994. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~re

- ynal/Civil
wars_12December2010.pdf%0Ahttps://
/think-
asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://
www.jstor.org/stable/41857625
- [15] Jumadi, "Tangani Stunting di Kabupaten Batang, Bank Jateng Gelontorkan Dana Rp1 Miliar," *batangkab.go.id*, 2023. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11582>
- [16] M. Gewati, "Luncurkan Program Genteng, TP-PKK Batang Targetkan 3.000 Anak Dapat Makanan Bergizi," *Kompas.com*, 2025. <https://kilasdaerah.kompas.com/kabupaten-batang/read/2025/07/28/173817778/luncurkan-program-genting-tp-pkk-batang-targetkan-3000-anak-dapat-makanan>
- [17] T. Vilysta, "Manfaatkan CSR Perusahaan, PKK Batang Tangani Anak Stunting," *rri.co.id*, 2025. <https://rri.co.id/kesehatan/1729317/manfaatkan-csr-perusahaan-pkk-batang-tangani-anak-stunting>
- [18] M. M. Ravsanjanie, A. S. Pawitra, K. C. Diyanah, Z. A. Zakaria, and N. H. B. Marmaya, "Utilization of Clean Water, Personal Hygiene of Toddler Caregivers, and Smoking Behavior of Family Members as Risk Factors for Cases of Stunting Toddlers," *J. Kesehat. Lingkung.*, vol. 13, no. 1, p. 48, 2021, doi: 10.20473/jkl.v13i1.2021.48-56.
- [19] D. Purnomo, S. Herwandito, K. Julis, I. Murni, B. S. Renyoet, and G. Mangalik, "Optimalisasi Multi-Pihak Untuk Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Salatiga Dalam Peluang Dan Tantangan," *Visi Sos. Hum.*, vol. 04, no. 2, pp. 81–98, 2023, doi: <https://doi.org/10.51622/vsh.v4i2.1967>.
- [20] D. Tasmata, N. D. Putranto, R. A. Rahmadani, and O. M. Kusuma, "Strategi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Program CSR PT Pertamina EP Rantau," *ARMADA J. Penelit. Multidisiplin*, vol. 1, no. 9, pp. 946–955, 2023, doi: 10.55681/armada.v1i9.821.
- [21] J. Wamea, D. Islami, and W. Srisadono, "Implementasi CSR PT. Pertamina Retail Dalam Program Pertamina Retail Peduli Stunting," *J. Cyber PR*, vol. 3, no. 2, p. 139, 2023, doi: <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v3i2.3771>.